

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM MENILAI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021-2024

Pera Julita¹, Rahma Maulidia², Ayu Umyana³

¹Akuntansi, Universitas Tanjungpura
email: b1034231036@student.untan.ac.id

²Akuntansi, Universitas Tanjungpura
email: rahma.maulidia@ekonomi.untan.ac.id

³Akuntansi, Universitas Tanjungpura
email: Ayuumyana@ekonomi.untan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial management performance of the Pontianak City Government for the 2021–2024 fiscal years using the Value for Money (VfM) approach with economy, efficiency, and effectiveness indicators. The study employs a descriptive quantitative method using secondary data from the Regional Budget (APBD) and Budget Realization Reports (LRA). The results show that the economy ratio was categorized as economical throughout 2021–2024, with an average ratio of 92.55%. The efficiency ratio was categorized as inefficient in 2021 and efficient in 2022–2024, with an average ratio of 98.84%. The effectiveness ratio was categorized as effective throughout the observation period, with an average ratio of 95.11%. These findings indicate that the Pontianak City Government has generally managed public finances effectively and efficiently, although improvements are still needed in budget planning and expenditure control to strengthen economy and maintain efficiency consistently.

Keywords: *Value for Money, financial performance, regional financial management, efficiency, effectiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021-2024 menggunakan pendekatan Value for Money (VfM) dengan indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi berada pada kategori ekonomis selama 2021–2024 dengan rata-rata 92,55%. Rasio efisiensi berada pada kategori tidak efisien pada 2021 dan efisien pada 2022–2024 dengan rata-rata 98,84%. Rasio efektivitas berada pada kategori efektif selama seluruh periode dengan rata-rata 95,11%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pontianak telah ekonomis, efisien, dan efektif, tetapi masih diperlukan perbaikan pada perencanaan anggaran dan pengendalian belanja agar kinerja ekonomi dan efisiensi dapat dipertahankan secara konsisten.

Kata kunci: *Value for Money, kinerja keuangan, pengelolaan keuangan daerah, efisiensi, efektivitas*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah tidak hanya berperan sebagai alat administrasi anggaran, tetapi juga sebagai instrumen utama yang mendukung pembangunan, pelayanan publik, pemerataan

kesejahteraan, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk mengelola anggaran dengan cara yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil (Polii et al., 2020).

Sejak diterapkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Kewenangan ini menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik, handal, dan berorientasi pada kinerja. Seiring dengan evolusi paradigma *good governance*, penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah tidak lagi hanya berfokus pada besarnya realisasi anggaran atau tingkat penyerapan belanja, tetapi juga pada seberapa efektif anggaran digunakan, dengan penghematan, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat (Sari et al., 2022). Pengelolaan keuangan daerah perlu dilihat sebagai proses strategis yang tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, tetapi juga pada penciptaan nilai publik (Mursalini & Indrawati, 2023).

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Besarnya tanggung jawab ini tercermin pada skala anggaran yang dikelola: menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Pontianak, total anggaran meningkat dari Rp1,83 triliun pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp2,18 triliun pada 2024. Namun, tingkat penyerapan anggaran yang tinggi tidak otomatis berarti pengelolaan keuangan daerah sudah baik (Mardlotillah et al., 2025). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah seharusnya juga diukur dari aspek penghematan (ekonomi), kemampuan memaksimalkan output dari sumber daya yang ada (efisiensi), serta pencapaian target dan tujuan pembangunan (efektivitas).

Salah satu pendekatan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh adalah konsep *Value for Money*. Dalam akuntansi sektor publik, konsep ini menekankan bahwa penggunaan dana publik harus memenuhi tiga prinsip utama ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (prinsip 3E). Dengan kerangka VFM, penilaian tidak hanya melihat realisasi anggaran, tetapi juga apakah pengeluaran dilakukan secara hemat, sumber daya dikelola untuk menghasilkan output optimal, dan tujuan pembangunan tercapai (Budianto & Handayani, 2022). Penerapan VFM merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara (Wahyuni, 2023).

Dalam praktiknya, banyak evaluasi keuangan daerah masih terfokus pada aspek administratif, seperti realisasi anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi (Mardlotillah et al., 2025). Padahal, prinsip *Value for Money* menuntut penilaian yang lebih komprehensif terhadap kualitas pengelolaan belanja publik melalui tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sehingga dapat diketahui tidak hanya sejauh mana anggaran direalisasikan, tetapi juga sejauh mana sumber daya publik digunakan secara hemat, efisien, dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sejumlah penelitian mengenai penerapan VFM pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sari et al., 2022), Provinsi Sulawesi Utara diperoleh (Indrayani & Khairunnisa, 2019), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tameon et al., 2023) telah menunjukkan adanya variasi kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas antardaerah. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada daerah dan periode pengamatan yang berbeda, sehingga belum memberikan gambaran mengenai penerapan VFM pada Pemerintah Kota Pontianak.

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada konteks Kalimantan Barat. Andrianus et al., (2024), misalnya, menganalisis kinerja finansial Pemerintah Kabupaten Sekadau periode 2019–2022 dan menemukan derajat desentralisasi yang sangat rendah dengan rata-rata 6,54% serta pola kemandirian daerah yang masih bersifat instruktif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan keuangan antardaerah dalam satu provinsi dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian pada Kabupaten Sekadau belum dapat secara langsung menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang memiliki karakteristik sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan publik di Kalimantan Barat.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengukur kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pontianak menggunakan pendekatan *Value for Money* dengan menganalisis aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara

simultan pada periode 2021–2024. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa keterbatasan bukti empiris mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak berdasarkan prinsip 3E pada periode tersebut. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis empiris terhadap anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah Pemerintah Kota Pontianak selama Tahun Anggaran 2021–2024. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan *Value for Money* secara terintegrasi pada konteks Pemerintah Kota Pontianak dalam periode 2021–2024, sehingga menghasilkan gambaran mengenai tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai penerapan VfM pada pemerintah daerah di Kalimantan Barat serta menjadi dasar evaluasi bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

II. LANDASAN TEORI

Teori *Good Governance*

Teori *Good Governance* menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum. Perspektif ini memperkuat pentingnya penerapan *Value for Money* sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang memenuhi prinsip 3E (ekonomi, efisiensi, efektivitas) turut mendukung terwujudnya tata kelola yang baik, karena menjamin setiap rupiah anggaran publik dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Tameon et al., 2023). Dengan demikian, Teori *Good Governance* menyediakan dasar teoretis yang kuat untuk pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan pendekatan VFM.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pengelolaan keuangan daerah berlangsung melalui siklus sistematis yang meliputi lima tahapan: (1) perencanaan, yang tercermin dalam RKPD dan KUA-PPAS; (2) penganggaran melalui APBD; (3) pelaksanaan program dan kegiatan; (4) pengendalian untuk mengurangi potensi penyimpangan; dan (5) pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk publik (Fadhila & Tanjung, 2022).

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Teori pengukuran kinerja menekankan keterkaitan antara tiga komponen utama: *input*, *output*, dan *outcome*. Pengukuran kinerja yang menyeluruh tidak hanya melihat besaran input atau kuantitas *output*, tetapi terutama menilai sejauh mana *outcome* tercapai secara berkelanjutan (Andriani, 2013). Dalam konteks pemerintahan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran saja; yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menghasilkan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan indikator yang menggabungkan dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang tercermin dalam konsep *Value for Money*.

Konsep *Value for Money* (VfM)

Value for Money (VfM) merupakan konsep penting dalam akuntansi sektor publik yang menegaskan bahwa pemanfaatan dana publik harus memenuhi prinsip 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Mardiasmo (2009), VfM berfungsi sebagai ukuran kinerja untuk menilai apakah sumber daya publik digunakan secara hemat, optimal, dan tepat sasaran. Prinsip ekonomi berkaitan dengan upaya pemerintah memperoleh dan menggunakan sumber daya dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Prinsip efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan (*input*) dan hasil yang diperoleh (*output*), sehingga suatu kegiatan dikatakan efisien apabila hasil yang dicapai dapat diperoleh dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih kecil. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efisiensi dapat dinilai dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Perbandingan tersebut menunjukkan seberapa besar sumber daya yang

dikeluarkan pemerintah daerah melalui belanja dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil direalisasikan. Semakin rendah proporsi realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan, semakin kecil sumber daya yang digunakan relatif terhadap pendapatan yang diperoleh, sehingga menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan rasio efisiensi dengan formula $\text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$, sebagaimana digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berbasis Value for Money (Indrayani & Khairunnisa, 2019). Prinsip efektivitas selanjutnya mengukur tingkat pencapaian target atau outcome yang ditetapkan dalam APBD; semakin tinggi realisasi dibandingkan dengan target pendapatan, semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. Pengukuran Rasio dan Kriteria Value for Money

No	Jenis Rasio	Formula	Keterangan	Kriteria
1.	Rasio Ekonomi	$\text{Anggaran Belanja} / \text{Realisasi Belanja} \times 100\%$	Mengukur kehematan penggunaan anggaran	< 100% Ekonomis = 100% Berimbang > 100% Tidak Ekonomis
2.	Rasio Efisiensi	$\text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$	Mengukur kemampuan menghasilkan <i>output</i> dari <i>input</i>	< 100% Efisien = 100% Berimbang > 100% Tidak Efisien
3.	Rasio Efektivitas	$\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$	Mengukur tingkat pencapaian target pendapatan	> 100% Sangat Efektif 90–100% Efektif 80–89% Cukup Efektif 60–79% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif

Sumber: Mardiasmo (2009) dalam Indrayani & Khairunnisa, (2019), diolah peneliti

Penelitian Terdahulu

Beberapa studi di Indonesia menunjukkan hasil beragam mengenai penerapan *Value for Money*. Tameon et al., (2023) menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis, efisien, dan efektif meskipun mengalami fluktuasi saat masa pandemi. Polii et al., (2020) melaporkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan kinerja yang ekonomis dan efektif, tetapi efisiensi masih belum optimal. Sari et al., (2022) menyimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja yang tergolong ekonomis, efisien, dan efektif. Mardlotillah et al., (2025) pada Pemerintah Kota Batu menegaskan bahwa tingginya tingkat penyerapan anggaran tidak selalu mencerminkan pengelolaan yang baik, sehingga penilaian berbasis VfM diperlukan. Penelitian Andrianus et al., (2024) terhadap Kabupaten Sekadau (2019–2022) mengungkapkan derajat desentralisasi yang sangat rendah (rata-rata 6,54%), tingkat ketergantungan finansial yang sangat besar (rata-rata 90,11%), serta rasio kemandirian daerah yang masih pada pola instruktif (rata-rata 7,34%), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kalimantan Barat masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hingga kini belum ada studi VfM yang khusus menelaah Pemerintah Kota Pontianak pada periode 2021–2024, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara sistematis menggunakan data numerik dari sumber resmi. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan untuk menguji hipotesis atau membangun model prediktif, melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada konsep *Value for Money* (VfM) (Budianto & Handayani, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Kota Pontianak, dengan unit analisis berupa laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021–2024. Data yang dianalisis meliputi anggaran dan realisasi pendapatan serta anggaran dan realisasi belanja daerah sebagaimana

tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Pontianak. Sumber data diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Kota Pontianak melalui portal pemerintah daerah dan perangkat pengelola keuangan daerah (BPKAD). Karena penelitian menggunakan seluruh laporan keuangan tahunan yang tersedia untuk periode 2021-2024, tidak terdapat proses sampling responden. Seluruh data tahun pengamatan digunakan sebagai unit analisis (total/sensus). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan menggunakan rasio keuangan dengan pendekatan *Value for Money* (VfM). Proses analisis bersifat deskriptif kuantitatif dan melibatkan perhitungan tiga rasio utama: rasio ekonomi ($\text{Anggaran Belanja} / \text{Realisasi Belanja} \times 100\%$), rasio efisiensi ($\text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$), dan rasio efektivitas ($\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$). Hasil perhitungan diinterpretasikan menurut kriteria yang telah ditetapkan dan dibandingkan antar tahun anggaran untuk menilai konsistensi serta tren kinerja keuangan daerah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kehematan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil perhitungan rasio ekonomi Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021–2024.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021–2024

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi belanja	Persentase	Keterangan
2021	1.826.922.969.966,00	1.638.258.591.231,52	111,52%	Tidak Ekonomis
2022	1.781.868.414.131,00	1.668.394.785.327,82	106,80%	Tidak Ekonomis
2023	1.826.037.795.400,00	1.705.137.526.178,83	107,09%	Tidak Ekonomis
2024	2.062.535.763.147,00	1.928.760.907.470,41	106,94%	Tidak Ekonomis

Sumber: APBD dan LRA Pemerintah Kota Pontianak (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 2, rasio ekonomi Pemerintah Kota Pontianak pada 2021–2024 secara konsisten masuk kategori tidak ekonomis. Nilai tertinggi tercatat pada 2021 (111,52%), kemudian menurun tajam menjadi 106,80% pada 2022. Pada 2023 rasio naik lagi menjadi 107,09% dan pada 2024 stabil sekitar 106,94%. Kondisi tidak ekonomis ini sesuai dengan rumusan Mardiasmo (2009) seperti dikutip Indrayani & Khairunnisa, (2019), yaitu nilai di atas 100% menandakan anggaran melebihi kebutuhan nyata mengindikasikan lemahnya akurasi perencanaan berbasis kinerja sejalan dengan temuan Mardlotillah et al., (2025) dan Polii et al., (2020). Pemerintah Kota Pontianak perlu memperbaiki akurasi perencanaan belanja berbasis kinerja dan memperkuat koordinasi antara unit perencanaan dan pelaksana program.

Fenomena serupa tercatat di daerah lain: Pemerintah Kota Batu juga mencatat realisasi belanja yang konsisten di bawah pagu akibat kapasitas pelaksanaan yang belum seimbang dengan skala anggaran Mardlotillah et al., (2025), dan di Sulawesi Utara ditemukan ketidak-ekonomisan pada OPD dengan kegiatan padat modal tetapi SDM perencanaan terbatas Polii et al., (2020). Temuan tersebut memperkuat bahwa penyebab rasio ekonomi tinggi di Pontianak bersifat struktural, yakni lemahnya kapasitas perencanaan berbasis kinerja di tingkat OPD sehingga pagu anggaran tidak mencerminkan kebutuhan dan kemampuan realisasi.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja daerah relatif terhadap pendapatan yang berhasil direalisasikan.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021–2024

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Persentase	Keterangan
2021	1.638.258.591.231,52	1.573.721.427.450,69	104,10%	Tidak Efisien

2022	1.668.394.785.327,82	1.704.897.506.230,20	97,86%	Efisien
2023	1.705.137.526.178,83	1.816.677.082.052,17	93,86%	Efisien
2024	1.928.760.907.470,41	1.937.581.220.070,02	99,54%	Efisien

Sumber: LRA Pemerintah Kota Pontianak (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 3, rasio efisiensi Pemerintah Kota Pontianak menunjukkan perbaikan berarti: dari tidak efisien pada 2021 (104,10%) menjadi efisien pada 2022 (97,86%), mencapai titik terbaik pada 2023 (93,86%), lalu naik mendekati keseimbangan pada 2024 (99,54%). Rata-rata 2021–2024 sebesar 98,84% menempatkan kota ini dalam kategori efisien. Pola “turun-turun-naik” menunjukkan risiko bahwa belanja yang tumbuh lebih cepat daripada pendapatan dapat menipiskan efisiensi, sejalan dengan temuan Indrayani & Khairunnisa (2019) dan Sari et al., (2022). Ke depan, perlu ada upaya agar peningkatan belanja diimbangi dengan langkah optimalisasi penerimaan.

Analisis Rasio Efektivitas

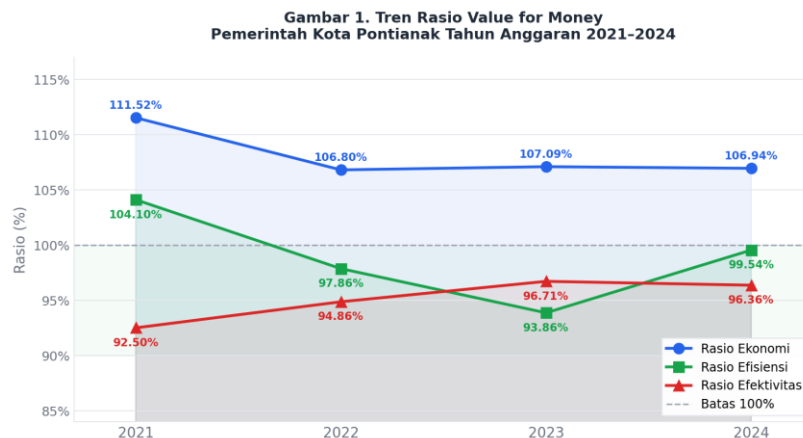
Rasio efektivitas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Semakin tinggi tingkat pencapaian target pendapatan, semakin efektif pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021–2024.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021–2024

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Persentase	Keterangan
2021	1.573.721.427.450,69	1.701.361.585.282,00	92,50%	Efektif
2022	1.704.897.506.230,20	1.797.318.690.779,00	94,86%	Efektif
2023	1.816.677.082.052,17	1.878.484.038.183,00	96,71%	Efektif
2024	1.937.581.220.070,02	2.010.874.558.202,00	96,36%	Efektif

Sumber: APBD dan LRA Pemerintah Kota Pontianak (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 4, rasio efektivitas Pemerintah Kota Pontianak selama 2021–2024 seluruhnya berada pada kategori efektif dengan rata-rata 95,11%, dan merupakan satu-satunya rasio VfM yang menunjukkan tren perbaikan konsisten, yaitu 92,50% (2021) menjadi 94,86% (2022) dan 96,71% (2023), sebelum sedikit menurun ke 96,36% pada 2024. Tren kenaikan tiga tahun berturut-turut ini mengindikasikan bahwa kapasitas Pemerintah Kota Pontianak dalam memproyeksikan dan merealisasikan pendapatan daerah semakin membaik, bukan sekadar fluktuasi acak, karena polanya konsisten pula terlihat pada menyempitnya selisih anggaran-realisis pendapatan dari Rp127,6 miliar (2021) menjadi Rp61,8 miliar (2023). Penyempitan gap tersebut diduga didorong oleh perbaikan basis data potensi pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi pemungutan pendapatan asli daerah pascapandemi, sehingga target anggaran yang ditetapkan semakin mendekati kapasitas fiskal riil. Kenaikan gap menjadi Rp73,3 miliar pada 2024 tidak dapat dimaknai sebagai kemunduran kinerja, melainkan konsekuensi dari penetapan target yang jauh lebih ambisius (Rp2,011 triliun); secara proporsional, deviasi 2024 (3,64%) justru masih lebih kecil dibandingkan deviasi 2021 (7,50%), yang menegaskan bahwa akurasi penetapan target pendapatan tetap terjaga meskipun angka target dinaikkan. Pola ini sejalan dengan temuan Tameon et al., (2023), Polii et al., (2020), dan Sari et al., (2022) bahwa efektivitas pencapaian target pendapatan daerah berkaitan erat dengan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro serta efisiensi pengelolaan belanja. Implikasinya, Pemerintah Kota Pontianak perlu mempertahankan momentum perbaikan akurasi perencanaan pendapatan ini, terutama dengan terus memutakhirkan basis data potensi PAD, agar kenaikan ambisi target pada tahun-tahun mendatang tidak berujung pada pelebaran gap anggaran-realisis yang signifikan.



Sumber: APBD dan LRA Pemerintah Kota Pontianak, diolah peneliti

V. KESIMPULAN

Analisis *Value for Money* atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pontianak (2021–2024) menunjukkan beberapa temuan utama. Pertama, aspek ekonomi dinyatakan tidak ekonomis karena anggaran belanja yang ditetapkan secara konsisten jauh melebihi realisasinya, menandakan akurasi perencanaan anggaran berbasis kinerja yang masih lemah. Kedua, aspek efisiensi berfluktuasi: 2021 tidak efisien (104,10%), 2022–2023 efisien (97,86% dan 93,86%), dan 2024 hampir seimbang (99,54%); rata-rata periode masuk kategori efisien, yang berarti belanja cenderung terkendali di bawah realisasi pendapatan. Ketiga, aspek efektivitas konsisten efektif selama seluruh periode, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan APBD. Secara umum, Pemerintah Kota Pontianak berhasil mencapai target pendapatan (efektivitas) dan rata-rata menunjukkan pengelolaan belanja yang seimbang dengan pendapatan (efisiensi), namun masih perlu perbaikan signifikan pada aspek ekonomi terutama akurasi perencanaan anggaran belanja. Dalam kerangka *Good Governance*, pengelolaan keuangan daerah harus lebih dari sekadar memenuhi target; setiap pengeluaran publik harus direncanakan dan dilaksanakan secara ekonomis dan efisien agar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

VI. KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan tiga indikator pengukuran kinerja keuangan berbasis konsep *Value for Money*, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dimensi kinerja keuangan lainnya seperti rasio kemandirian daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio pertumbuhan pendapatan tidak dianalisis dalam penelitian ini, sehingga gambaran kinerja keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya komprehensif. Kedua, penggunaan data sekunder (APBD dan LRA) membatasi kemampuan analisis untuk menggali faktor penyebab yang lebih mendalam, seperti kendala kelembagaan, kapasitas SDM, maupun dinamika politik anggaran; penelitian lanjutan disarankan melengkapi pendekatan kuantitatif dengan wawancara mendalam kepada pengelola keuangan daerah. Ketiga, cakupan yang terbatas pada Kota Pontianak menyebabkan temuan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung; perluasan ke perbandingan antarpemerintah daerah di Kalimantan Barat akan memberikan gambaran yang lebih representatif. Berdasarkan temuan ini, Pemerintah Kota Pontianak disarankan untuk: (1) meningkatkan akurasi perencanaan anggaran berbasis kinerja yang lebih realistis; (2) memperkuat mekanisme pengawasan belanja agar efisiensi terjaga secara konsisten; (3) mengoptimalkan serapan anggaran secara tepat waktu guna meminimalkan deviasi pagu-realisasi; dan (4) menerapkan evaluasi VfM secara berkala sebagai instrumen akuntabilitas publik yang berorientasi pada hasil.

VII. REFERENSI

Andriani, S. (2013). Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip *Value For Money* Pemerintah Kota Batu. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.18860/Em.V3i1.2349>

- Andrianus, A., Hijriah, A., & Astarani, J. (2024). Analisis Kinerja Finansial Pemerintah Kabupaten Sekadau Periode 2019-2022. *Jurnal Maneksi*, 13(2), 493–499. <https://doi.org/10.31959/Jm.V13i2.2322>
- Budianto, A., & Handayani, N. (2022). Analisis *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 11(3).
- Fadhila, N., & Tanjung, J. S. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money*. *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.59086/Jeb.V1i2.50>
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.29103/Jak.V6i1.1820>
- Mardlotillah, U., Putri, A. M., & Suriyanti, L. H. (2025). Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Periode 2021-2023. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(3), 805–813. <https://doi.org/10.35446/Akuntansikompetif.V8i3.2405>
- Esislahyenti, E., Mursalini, W. I., & Indrawati, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money* (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26454–26465.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep *Value For Money*. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 781–788. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072>
- Sari, G. Y. N., Nanda, S. T., Berty, I., & Zenita, R. (2022). Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 56–65. <https://doi.org/10.35446/Akuntansikompetif.V5i1.839>
- Tameon, A. F., Rafael, S. J. M., & Ga, L. L. (2023). Analisis Kinerja Anggaran Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 11(1), 40–50. <https://doi.org/10.35508/Jak.V11i1.10250>
- Wahyuni, A. (2023). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi Apbd Provinsi Sumatera Utara 2020-2022). (6).